



ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP AKSESABILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA PERIODE SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL

Dayu Larasati^a, Hendra Saputra^b

^aBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia. Email: dayu.larasati@gmail.com.

^bBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia. Email: hendrasahputra85@gmail.com.

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL

Diterima Pertama
3 Maret 2014

Dinyatakan Dapat Dimuat
10 Juni 2014

KATA KUNCI:

desentralisasi,
fiskal,
pendidikan,
kabupaten/kota

ABSTRAK

Fiscal decentralization carried out with the belief that local governments understand the needs of people in the region better than the Central Government does. With a policy of fiscal decentralization, local governments are expected to achieve a more equitable social welfare. This research was conducted because of the increasing demands of society that the government should pay attention to their needs, especially education that is now a major requirement for the community and even falls into one of national priorities. The conclusions of this study are: 1. Increased own source revenue (PAD), general purpose grant (DAU) and special purpose grant (DAK) of education can increase educational spending by district/municipality local government; 2. Increased spending on education by district/municipality local government can improve the accessibility of education by the public; 3. The welfare of district/municipality can increase educational spending by district/municipality local government and accessibility of public education 4. In rich district/municipality, the increase in local government education spending has a greater effect on increasing accessibility of public education than in poor district/municipality; 5. Fiscal decentralization policy can improve the accessibility of education by the community.

Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebih memahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya, peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Dengan penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada tiap daerah otonom dalam rangka desentralisasi, daerah otonom berhak untuk mengelola sumber daya yang terdapat di wilayahnya dan wajib melakukan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah tersebut diserahkan pada dasarnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, namun untuk urusan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota atau belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi 11 bidang termasuk didalamnya adalah pendidikan dan kebudayaan. Bahl (1998) dan Rahmawati (2008) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (*expenditure assignment*) sehingga

hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Dengan demikian, kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Mardiasmo, 2009).

Pendidikan dianggap sebagai hal terpenting dibandingkan bidang-bidang pemerintahan lain yang disebutkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Di abad 21 ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan selalu menjadi prioritas. Tanpa pendidikan yang memadai dan baik, suatu negara tidak akan memiliki tunas bangsa yang bermutu tinggi untuk menjadi penerus generasi. Seperti yang dikemukakan oleh Tim UNESCO (2001), suatu negara tidak dapat dinyatakan berhasil apabila belum mendidik rakyatnya. Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa negara seharusnya mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Susanto dan Kurniawan, 2009). Amanat untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% baik dari APBN dan APBD tersebut diharapkan dapat mendorong pelayanan dan pemerataan pendidikan menjadi semakin efektif mengingat desentralisasi fiskal yang tidak hanya menyerahkan kewenangan penganggaran namun juga penyerahan urusan dalam pendidikan pada Pemerintah Daerah. Seperti disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Salah satu dampak desentralisasi fiskal seperti disebutkan pada Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2011 adalah semakin besarnya dana yang bergulir ke daerah, baik yang dikelola dalam APBD maupun APBN. Hal tersebut menjelaskan mengapa jumlah pengeluaran pendidikan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dikelola melalui APBD meningkat drastis pada era desentralisasi fiskal. Dengan keharusan memenuhi amanat untuk menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20%, maka semakin besar anggaran yang dikelola oleh Kabupaten/Kota semakin besarlah jumlah pengeluaran pendidikan Kabupaten/Kota tersebut. Dinyatakan pula pada Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2011 bahwa dalam konteks pendanaan desentralisasi, efektivitas dana yang semakin besar bergulir ke daerah dibelanjakan oleh daerah dan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan.

Penelitian ini dilakukan karena semakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya, terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkan termasuk dalam 11 prioritas nasional. Terlebih lagi, pendidikan merupakan salah satu dimensi pengukuran dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Human development index merupakan indeks kemajuan sosial dan ekonomi negara-negara yang diukur dari tiga dimensi yaitu pendidikan, dimensi kesehatan, dan standar hidup. Di Indonesia, dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia diukur dengan indikator angka melek huruf orang dewasa dan angka partisipasi kasar (*gross enrollment rate*) pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Angka melek huruf orang dewasa dan angka partisipasi kasar tersebut juga dianggap sebagai ukuran aksesibilitas pendidikan atau kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Tim Media Indonesia, 2011).

Penerapan otonomi daerah yang meliputi penyerahan urusan pemerintah daerah diikuti oleh sumber-sumber pendanaan dalam rangka desentralisasi. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal yang diwakili dengan sumber-sumber pendanaan penerapan otonomi daerah dengan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudian menganalisis hubungan antara pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dengan peningkatan aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat.
3. Mendapatkan bukti empiris bahwa kesejahteraan daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat.
4. Mendapatkan bukti empiris bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap aksesibilitas pendidikan lebih besar pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih miskin.
5. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja (2005), otonomi daerah merupakan proses peralihan dari sistem dekonsentrasi menjadi

sistem desentralisasi. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dasar-dasar sistem hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kuncoro (2004) mengatakan bahwa sekalipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan suatu komitmen politik mengenai otonomi daerah, namun dalam praktek yang terjadi masih berupa sentralisasi (kendali dari pusat) yang sangat dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Bergulirnya era reformasi pada tahun 1998 berdampak pada tuntutan masyarakat akan pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya. Akibat tuntutan tersebut, pemerintah menerbitkan dua Undang-Undang mengenai sistem pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, otonomi daerah akhirnya benar-benar dicanangkan pemerintah pada tahun 2001. Hal tersebut menurut Widjaja (2005) dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah. Kuncoro (2004) menyebutkan bahwa setelah otonomi daerah dicanangkan, pembangunan di daerah terutama pembangunan fisik maju dengan cukup pesat. Namun pada sisi lain, ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat juga menjadi sangat tinggi akibat dari pembangunan yang semakin besar tersebut. Ketergantungan fiskal dapat dilihat dari dominannya transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Relatif rendahnya kemandirian pembiayaan daerah tersebut dikhawatirkan oleh Widjaja (2005) mengakibatkan berbagai kegiatan pembangunan di daerah terancam gagal dan tidak berjalannya kegiatan perekonomian di tingkat daerah.

Tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2004) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengertian desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desentralisasi fiskal secara lebih khusus dapat didefinisikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan.

Penelitian Dillinger (1994) dalam Hirawan (2007) tentang pelaksanaan desentralisasi di berbagai belahan dunia menemukan bahwa pemicu dilakukannya kebijakan desentralisasi fiskal adalah keinginan atau upaya untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik. Menurut Mardiasmo (2004), desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat yang nyata. Manfaat yang pertama yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Manfaat yang kedua yaitu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pemberian peran pengambil keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Terdapat beberapa pendapat mengenai desentralisasi fiskal, misalnya Litvack *et al* (1998) dalam Utama (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik karena pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum, dengan alasan:

- a. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya;
- b. Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat;
- c. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan

mendorong pemerintah lokal untuk melakukan inovasi.

Sependapat dengan Litvack *et al* (1998), Innocents (2011) mengemukakan bahwa argumen dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengeluaran dan peningkatan barang publik dengan mendekati pemerintah kepada rakyatnya. Desentralisasi fiskal mengacu pada sistem antar pemerintah di mana keseimbangan kekuasaan harusnya bergerak ke arah sektor subnasional untuk administrasi dan tata kelola yang lebih baik.

Brennan dan Buchanan (1980) dalam Kyriacou dan Sagalés (2011) juga berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pemerintah, yaitu dengan mendukung kompetisi antaryurisdiksi untuk menggali sumber daya fiskal sehingga membuat Pemerintah Daerah lebih responsif terhadap preferensi masyarakat.

2.2. Aksesibilitas Pendidikan oleh Masyarakat dalam Dimensi Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan, sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hak asasi setiap manusia. Hal tersebut berarti bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ukuran aksesibilitas pendidikan dimaksudkan untuk mengukur seberapa merata layanan pendidikan di suatu wilayah dapat diperoleh masyarakat. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan merupakan salah satu dimensi pengukuran disamping kesehatan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dalam IPM menunjukkan seberapa baik masyarakat mendapatkan pendidikan di suatu negara.

Hingga tahun 2009, ukuran yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung dimensi pendidikan IPM yaitu *adult literacy rate* atau tingkat melek huruf usia 15 tahun keatas dan *combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio* atau Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat primer, sekunder, dan tersier. APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kelompok usia tersebut adalah 7-12 tahun untuk sekolah dasar, 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama, 16-18 tahun untuk sekolah menengah, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi. Tingkat melek huruf dan APK dikatakan oleh UNDP merupakan ukuran aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat (Tim UNDP, 2010). Ukuran aksesibilitas pendidikan pada penelitian ini untuk selanjutnya akan mengikuti pengukuran oleh UNDP tersebut. Pada Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2010, UNDP memperkenalkan indikator-indikator baru dalam pengukuran IPM. Pada dimensi pendidikan, lama rata-rata sekolah (*mean years of schooling*) dan lama harapan sekolah (*expected years of schooling*) menggantikan *adult literacy rate* dan *combined primary, secondary, and tertiary gross enrollment ratio*. Dengan perubahan indikator ini,

UNDP mengharapkan dimensi pendidikan dalam IPM dapat mengukur kualitas pendidikan di suatu negara dengan lebih baik. Indikator-indikator baru dalam pengukuran IPM tersebut digunakan pada Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2010 dan Laporan Pembangunan Manusia tahun-tahun berikutnya.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal dan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang otonom telah beberapa kali diteliti sebelumnya. Penelitian Busemeyer (2007), yang meneliti 21 Negara yang tergabung dalam OECD dengan periode tahun 1980-2001, menghasilkan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan signifikan positif dengan pengeluaran publik di bidang pendidikan. Argumen Busemeyer dalam hasil penelitian tersebut adalah karena tendensi Pemerintah Daerah adalah untuk berlomba-lomba dalam hal penyediaan barang publik (*race to the top*). Penyediaan barang publik tersebut, menurut Busemeyer ditujukan untuk menarik simpati masyarakat yang merupakan pemilih (*voters*) perangkat kepemimpinan daerah otonom.

Penelitian yang menghasilkan kesimpulan sebaliknya dilakukan oleh Qing dan Shi (2010) yang melakukan penelitian pada seluruh daerah otonom di Cina kecuali Taiwan, Hongkong and Macau dan Kota Beijing, Tianjin, Shanghai and Chongqing. Kesimpulan penelitian Qing dan Shi adalah bahwa desentralisasi fiskal menurunkan penyediaan pendidikan masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dijelaskan oleh Zhou (2007) dalam Qing dan Shi (2010) diakibatkan oleh besarnya pemberian wewenang untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan pada daerah otonom namun keputusan pemilihan tidak berada pada masyarakat lokal. Daerah otonom di Cina cenderung untuk memaksimalkan pencapaian politik dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan publik masyarakat daerah khususnya pendidikan. Perlombaan tiap-tiap daerah otonom di Cina pada akhirnya menghasilkan *yard-stick competition* antardaerah.

Dalam menganalisis hubungan antara kebijakan desentralisasi dan pengeluaran pendidikan di Indonesia, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sukaesih (2008) dan Priyono (2005). Priyono (2005) yang meneliti 245 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2002, menyimpulkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan berhubungan signifikan positif terhadap pengeluaran pendidikan. Sukaesih (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Patut diduga bahwa kesejahteraan masyarakat berhubungan positif dengan pengeluaran pendidikan. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pada daerah miskin, alokasi pengeluaran pendidikan

menjadi tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan alokasi untuk pengeluaran lainnya. Pemikiran tersebut didukung oleh penelitian Baldacci, Clements, Gupta dan Cui (2004) yang menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat (dalam penelitian tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB per kapita) berhubungan positif dengan pengeluaran pendidikan. Hal tersebut terjadi karena tingginya permintaan akan pendidikan akan lebih mungkin terjadi pada daerah yang lebih kaya.

Penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004) yang meneliti 120 negara berkembang menghasilkan kesimpulan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh signifikan pada *education capital* yang diukur dengan *proxy* APK (Angka Partisipasi Kasar). Senada dengan hasil penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, di Indonesia terdapat penelitian Sukaesih (2008) yang meneliti Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Sukaesih menggunakan ukuran angka partisipasi kasar sebagai indikator aksesabilitas pendidikan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap angka partisipasi kasarSD, SLTP, dan SLTA.

Penelitian Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan (diukur dengan PDB per kapita) berpengaruh signifikan pada *education capital* (diukur dengan angka partisipasi kasar atau *gross enrollment rate*).

Penelitian Sukaesih (2008) menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi aksesabilitas pendidikan yang diukur dengan Angka Partisipasi Kasar. Sependapat dengan Sukaesih, Samosir (2008) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat memperluas aksesabilitas pendidikan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Atas dasar tinjauan literatur yang dipaparkan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1a : PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan;
- H1b : DAK berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan;
- H1c : DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan;
- H2 : Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan;
- H3 : Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan;
- H4a : Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan;
- H4b : Pengaruh belanja pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh belanja pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin;
- H5 : Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kotadi Indonesia. Sampel yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten/Kota pada rentang tahun 1996-2000 (untuk mewakili era sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan) dan tahun 2005-2009 (untuk mewakili era kebijakan desentralisasi fiskal). Setelah dilakukan rekapitulasi data penelitian, jumlah sampel *cross section* yang terkumpul adalah 282 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini terdapat dua model penelitian. Untuk model pengeluaran pendidikan, yang digunakan sebagai sampel adalah data pada 282 Pemerintah Kabupaten/Kota pada era kebijakan desentralisasi fiskal yaitu tahun 2005-2009 dengan total 1156 observasi. Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan mengingat dua variabel bebas yang digunakan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang menjadi ciri khusus kebijakan desentralisasi fiskal dan tidak ada sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan.

Sedangkan, sampel yang digunakan untuk model aksesabilitas pendidikan adalah data pada 276 Pemerintah Kabupaten/Kota pada rentang tahun 1996-2000 (untuk mewakili era sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan) dan tahun 2005-2009 (untuk mewakili era kebijakan desentralisasi fiskal) dengan total 2485 observasi.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan meninjau literatur-literatur yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut berupa buku cetak, jurnal, skripsi, majalah, situs internet, dan sebagainya. Tujuan dari studi literatur menurut Sekaran (2003) adalah untuk memastikan bahwa tidak ada variabel penting mengenai suatu masalah dalam penelitian yang terlewatkan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengikhtisarkan seluruh data sekunder terkait penelitian yang diperoleh dari sumber data baik berupa data yang dipublikasikan maupun data yang tidak dipublikasikan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data terkait realisasi APBD yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pengeluaran pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari publikasi internet dan basis data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk data mengenai angka partisipasi kasar, angka melek huruf, dan pendapatan domestik

regional bruto didapatkan dari ikhtisar statistik Badan Pusat Statistik.

3.4. Model Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data panel. Model regresi data panel secara umum dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006):

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan:

- N = jumlah observasi
- T = jumlah waktu
- N X T = banyaknya unit data panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Model Pengeluaran Pendidikan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diyakini bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mampu mendorong peningkatan belanja pendidikan, model yang dibangun pada penelitian ini adalah:

$$BPEND = \alpha + \beta PAD_{it} + \beta DAU_{it} + \beta DAK_{it} + \beta WEALTH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model penelitian di atas merupakan modifikasi dari model penelitian sebelumnya oleh Sukaesih (2008):

$$eduspend_{it} = f(dak_{it}, dau_{it}, ycap_{it}, ddes)$$

dimana,

- eduspend : pengeluaran pendidikan pemkab pemkot
- Dau : dana alokasi umum pemkab/pemkot
- Dak : dana alokasi khusus pemkab/pemkot
- Ycap : PDRB per kapita kabupaten/kota
- Ddes : dummy desentralisasi
- i : Kabupaten/kota di Pulau Jawa
- t : Sebelum desentralisasi (1995-1997) dan setelah desentralisasi (2003-2006)

Model tersebut dimodifikasi dengan menambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah karena Pendapatan Asli Daerah sangat erat hubungannya dengan desentralisasi fiskal mengingat tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Variabel PAD juga digunakan oleh Priyono (2005) yang meneliti 245 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2002. Variabel dummy desentralisasi yang digunakan oleh Sukaesih (2008) dihilangkan dalam model ini karena model pengeluaran pendidikan pada penelitian ini meneliti pengeluaran pendidikan pasca desentralisasi fiskal saja. Variabel *dummy* kesejahteraan daerah yang mengategorikan suatu kabupaten/kota sebagai daerah yang kaya atau miskin

dengan ukuran rata-rata pendapatan domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku ditambahkan pada model untuk mengetahui pengaruh kesejahteraan masyarakat suatu daerah pada pengeluaran pendidikan di kabupaten/kota tersebut.

2. Model Aksesibilitas Pendidikan

Model aksesibilitas pendidikan pada penelitian ini terutama ditujukan untuk mengetahui korelasi antara pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat (EDU). Model aksesibilitas pendidikan yang dibangun pada penelitian ini adalah:

$$EDU = \alpha + \beta BPEND_{it} + \beta WEALTH_{it} + \beta FD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model penelitian di atas merupakan modifikasi dari model penelitian sebelumnya oleh Sukaesih (2008):

$$ger = f(eduspend_{it}, ilterate_{it}, ycap_{it}, ddes)$$

dimana,

- Ger : persentase penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah terhadap penduduk usia 6-18 tahun (*Gross Enrollment Rate*)
- eduspend : pengeluaran pendidikan pemkab pemkot
- Ilterate : tingkat buta huruf dewasa (18 tahun ke atas)
- Ycap : PDRB per kapita kabupaten/kota
- Ddes : dummy desentralisasi
- I : Kabupaten/kota di Pulau Jawa
- T : Sebelum desentralisasi (1995-1997) dan setelah desentralisasi (2003-2006)

Model tersebut dimodifikasi dengan mengubah ukuran tingkat aksesibilitas pendidikan masyarakat yang oleh Sukaesih (2008) diwakili oleh *Gross Enrollment Rate*, pada penelitian ini diwakili oleh ukuran aksesibilitas pendidikan yang digunakan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), yaitu dengan rumus:

$$\left(\frac{1}{3} \times \overline{APK}\right) + \left(\frac{2}{3} \times AMH\right)$$

dengan keterangan:

- \overline{APK} : rata-rata angka partisipasi kasar (laki-laki dan perempuan) atau *combined grossenrolment rate* tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi
- AMH : angka melek huruf (*literacy rate*)

Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, Tabel 1 menyajikan secara ringkas definisi operasional variabel tersebut.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Notasi	Definisi	Bentuk Variabel	Satuan
1	BPEND	Pengeluaran pendidikan.	Realisasi belanja pendidikan.	Rp
2	EDU	Indikator aksesabilitas pendidikan.	Angka melek huruf dewasa (usia di atas 15 tahun) dan angka partisipasi kasar kombinasi laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP, SMA, dan Universitas.	%
3	PAD	Pendapatan asli daerah.	Realisasi pendapatan asli daerah.	Rp
4	DAU	Dana alokasi umum.	Realisasi dana alokasi umum.	Rp
5	DAK	Dana alokasi khusus.	Realisasi dana alokasi khusus pendidikan.	Rp
6	FD	Desentralisasi fiskal	<i>Dummy</i> desentralisasi fiskal Tahun 1996-2000 (sebelum desentralisasi fiskal) = 0. Tahun 2005-2009 (desentralisasi fiskal) = 1.	-
7	WEALTH	Kesejahteraan Daerah (untuk menentukan kategori miskin/kaya)	<i>Dummy</i> rata-rata pendapatan domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku. Dibawah rata-rata PDRB per kapita (daerah miskin) = 0. diatas rata-rata PDRB per kapita (daerah kaya) = 1.	-

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi data panel menggunakan bantuan perangkat lunak *EViews* 7.1 dan *SPSS* 17.0. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis analisis pemilihan metode regresi, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Model Pengeluaran Pendidikan

4.1.1. Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Untuk model pengeluaran pendidikan, metode regresi data panel yang sesuai adalah metode *weighted: cross-section weight*. Berdasarkan pada hasil pengujian Hausman yang menunjukkan signifikansi sehingga H_0 ditolak, maka metode regresi data panel

tidak dapat menggunakan *random effect model* (REM) atau harus menggunakan *fixed effect model* (FEM).

Pengujian untuk menentukan metode kemudian dilanjutkan dengan menemukan dugaan heteroskedastisitas dengan melakukan uji LM (*Lagrange Multiplier*) atau yang juga dikenal dengan Breusch-Pagan *test*. Hasil dari uji LM tersebut mempunyai *p-value* 0.000 atau signifikan sehingga H_0 ditolak dan terbukti bahwa terdapat heteroskedastisitas. Karena model FEM memiliki struktur heteroskedastisitas, sesuai dengan Greene (2000) dalam Yuniarti (2010), model tersebut harus diestimasi dengan metode *weighted: cross-section weight*.

4.1.2. Hasil Uji Model Pengeluaran Pendidikan

Hasil output regresi data panel model pengeluaran pendidikan dari aplikasi *EViews* dirangkum pada tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Ringkasan Output Regresi Model Pengeluaran Pendidikan

Dependent Variable : Pengeluaran Pendidikan (BPEND)

	Koefisien	t-statistik	<i>p-value</i>
PAD	0,133539	9,40484	0,000
DAU	0,692642	56,85632	0,000
DAK	0,426204	12,64864	0,000
WEALTH	42460,76	9,96112	0,000
C	-70849,39	-14,23702	0,000
<i>R-squared</i>	0,880093		
<i>Adj. R-squared</i>	0,879676		
F-statistik	2112,030		
Prob(F-statistik)	0,000000		

Variabel PAD, DAU, DAK ditransformasi menggunakan *square-root*

4.1.2.1. Hasil Uji-F

Output hasil regresi model pengeluaran pendidikan seperti yang dirangkum pada tabel 2 menunjukkan *p-value* F-statistik 0.000. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan pada taraf signifikansi 1%. Hasil yang signifikan tersebut menurut Nachrowi dan Usman (2006) menunjukkan bahwa paling tidak terdapat satu *slope* regresi yang signifikan secara statistik. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji-F di atas, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan kesejahteraan daerah secara simultan mempengaruhi pengeluaran pendidikan.

4.1.2.2. Hasil Uji-t

Hasil uji-t pada model pengeluaran pendidikan menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki *p-value* t-statistik yang signifikan pada taraf signifikansi 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang terdapat dalam model

berpengaruh secara statistik terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien tiap-tiap variabel terikat seperti yang terlihat dalam tabel 2. menunjukkan seberapa besar tambahan unit variabel terikat apabila terdapat penambahan satu unit variabel bebas. Contohnya variabel DAK yang memiliki koefisien 0,426204, hal tersebut berarti bahwa setiap terjadi penambahan satu unit *square-root* DAK, maka akan terjadi penambahan 0,426204 unit *square-root* pengeluaran pendidikan (dengan asumsi *ceteris paribus*).

4.1.2.3. Hasil Uji Goodness of Fit (R^2)

Nilai koefisien determinasi atau R^2 menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Dapat dilihat pada tabel 2. bahwa nilai *adjusted* R^2 model pengeluaran pendidikan adalah sebesar 0,879676. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 87,97% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdapat pada model. Sisa variasi variabel terikat sebesar 12,03% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model.

4.1.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Pengeluaran Pendidikan

Pada model pengeluaran pendidikan, terdapat empat hipotesis yang akan diuji. Hasil pengujian pada hipotesis-hipotesis tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. *H1a: PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.*

Untuk menguji apakah hipotesis pertama ini dapat diterima, dapat dilakukan uji individu dengan membandingkan t_{hit} variabel PAD dengan t tabel. Selain dengan cara tersebut, pengujian hipotesis dapat juga dilihat dari *p-value* variabel PAD. Apabila *p-value* PAD lebih kecil daripada α (taraf signifikansi), maka H_0 ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pengeluaran pendidikan (BPEND). *p-value* t-statistik variabel PAD adalah 0.000 sehingga dapat dinyatakan signifikan pada taraf signifikansi (α) 1%. Berdasarkan hal tersebut, maka H_0 ditolak dan hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima. Koefisien variabel PAD seperti yang dapat dilihat pada tabel 2. bernilai positif sebesar 0,133539. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BPEND. Hasil pengujian hipotesis pertama ini sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005).

2. *H1b: DAK berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.*

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki *p-value* t-statistik sebesar 0.000 sehingga dapat dikatakan signifikan pada taraf signifikansi 1%. Dengan *p-value* t-statistik sebesar 0.000 maka H_0 ditolak dan hipotesis H1b dapat diterima. Koefisien variabel DAK, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan angka positif sebesar 0,426204.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis H1b ini sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Sukaesih (2008). Dalam dua penelitian tersebut ditemukan juga bahwa DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *special purpose grant* dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sesuai dengan sifat DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat menggunakan DAK pendidikan untuk dibelanjakan pada fungsi pendidikan. Hal tersebut dapat menjelaskan mengapa kedua penelitian mengenai DAK pendidikan sebelumnya menunjukkan hasil yang sama, yaitu DAK pendidikan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

3. *H1c: DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.*

Pada tabel 2, variabel DAU menghasilkan *p-value* t-statistik sebesar 0.000 dengan koefisien positif 0,692642. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Secara signifikan pada taraf signifikansi 1%, DAU berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis H1c tersebut sesuai dengan hasil penelitian Priyono (2005) dan Samosir (2008) namun bertolak belakang dengan penelitian Sukaesih (2008) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pendidikan. Menurut Sukaesih (2008), DAU yang bersifat sebagai *block grant* mengakibatkan Pemerintah Daerah kurang menangkap bahwa salah satu tujuan alokasi DAU adalah untuk tujuan pembangunan, salah satunya untuk pendidikan. Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak menghabiskan DAU untuk membiayai pengeluaran rutin misalnya belanja pegawai.

Argumen untuk pengaruh positif DAU terhadap pengeluaran pendidikan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Busemeyer (2007). Pemerintah Daerah memiliki tendensi untuk berlomba-lomba dalam hal penyediaan barang publik (*race to the top*). Penyediaan barang publik tersebut, menurut Busemeyer ditujukan untuk menarik simpati masyarakat yang merupakan pemilih (*voters*) perangkat kepemimpinan daerah otonom.

Di Indonesia Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota dipilih oleh masyarakat di daerahnya dan bukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga teori yang diungkapkan oleh Busemeyer tersebut dapat diaplikasikan. Sifat dari DAU sebagai *block grant* sehingga dapat dialokasikan dengan bebas oleh Pemerintah Daerah justru dapat memenuhi dugaan Busemeyer tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran publik (salah satunya di bidang pendidikan) untuk menarik simpati pemilih (*voter*). Setuju dengan hal tersebut, Samosir (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk

memenuhi kebutuhan publik misalnya pendidikan, Pemerintah Daerah tidak selalu menunggu *special purpose grant* (DAK) untuk memenuhinya, Pemerintah Daerah dapat menggunakan *block grant* (DAU) yang bebas digunakan dibawah kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

4. H2: Kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis H2 dapat dilihat dari *p-value* t-statistik dari variabel WEALTH. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa *p-value* WEALTH adalah 0.000 atau signifikan pada taraf signifikansi 1% sehingga H_0 dapat ditolak. Dapat disimpulkan dari hasil *p-value* yang signifikan dan koefisien variabel WEALTH yang bernilai positif bahwa kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan.

Hasil uji hipotesis tersebut sesuai dengan penelitian Baldacci, Clements, Gupta dan Cui (2004). Menurut Baldacci, Clements, Gupta dan Cui, hal tersebut terjadi diyakini karena tingginya permintaan akan pendidikan akan lebih mungkin terjadi pada daerah yang lebih kaya dibandingkan dengan daerah yang miskin.

Selain karena permintaan akan pendidikan yang lebih tinggi pada daerah yang lebih kaya, pengaruh positif kesejahteraan daerah terhadap pengeluaran pendidikan dapat terjadi karena pembangunan (terutama infrastruktur) yang cenderung lebih memadai di suatu daerah yang tergolong kaya sehingga akan mendukung terselenggaranya pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.

4.2. Model Aksesabilitas Pendidikan

4.2.1. Analisis Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Metode regresi data panel yang sesuai dengan model aksesabilitas pendidikan adalah REM (*Random Effect Method*). Pemilihan metode tersebut didasari karena model tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada uji Hausman, yaitu 0.0816 (*cross-section random effects*) dan 0.223 (*period random effect*). Dengan hasil penelitian tersebut maka H_0 uji Hausman diterima, dan model regresi data panel harus diestimasi dengan menggunakan REM.

4.2.2. Hasil Uji Model Aksesabilitas Pendidikan

Hasil output regresi data panel model aksesabilitas pendidikan dengan menggunakan aplikasi EViews dirangkum pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Output Regresi Model Aksesabilitas Pendidikan

<i>Dependent Variable</i> : Aksesabilitas Pendidikan (EDU)			
	Koefisien	t-statistik	<i>p-value</i>
BPEND	1,46787	2.457506	0,0141
WEALTH	6,05354	5.439781	0,000

	Koefisien	t-statistik	<i>p-value</i>
FD	4,46835	19.08027	0,000
C	76,69123	157.7354	0,000
R-squared		0.443840	
Adj. R-squared		0.443167	
F-statistik		659.9811	
Prob(F-statistik)		0,000000	

Variabel BPEND ditransformasi menggunakan *square-root*

4.2.2.1 Hasil Uji-F

Seperti dapat dilihat pada tabel 3, *p-value* F-statistik model aksesabilitas pendidikan bernilai 0.000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kesimpulan dari hasil uji-F tersebut yaitu bahwa pengeluaran pendidikan (BPEND), kesejahteraan daerah (WEALTH), dan kebijakan desentralisasi fiskal (FD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU).

4.2.2.2 Hasil Uji-t

Hasil uji-t pada model aksesabilitas pendidikan menunjukkan bahwa variabel bebas kebijakan desentralisasi fiskal (FD) dan kesejahteraan daerah memiliki *p-value* t-statistik 0.000 atau signifikan pada taraf signifikansi 1%, sedangkan variabel bebas pengeluaran pendidikan (BPEND) memiliki *p-value* t-statistik 0.0141 atau signifikan pada taraf signifikansi 5%. Koefisien BPEND sebesar 1,46787 dapat diartikan bahwa apabila terdapat penambahan satu unit *square root* pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah 1,46787 persentase aksesabilitas pendidikan.

4.2.2.3. Hasil Uji Goodness of Fit (R²)

Nilai koefisien determinasi atau R² menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa nilai *adjusted* R² model aksesabilitas pendidikan adalah sebesar 0.443167. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 44,32% variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdapat pada model. Sisa variasi variabel terikat sebesar 55,68% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model. Rendahnya nilai *adjusted* R² menurut Gujarati (2003) dapat diakibatkan karena hanya terdapat sedikit variabel bebas yang dilibatkan untuk memprediksi variabel terikat. Menurut Gujarati (2003), apabila nilai R² yang didapatkan pada suatu proses penelitian rendah, tidak berarti bahwa model penelitian tersebut buruk. Oleh karena itu, para peneliti seharusnya lebih peduli mengenai relevansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis dan logis, serta signifikansinya secara statistik.

4.2.2.4 Hasil Uji Hipotesis Model Aksesabilitas Pendidikan

1. *H3: Pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.*

Pada tabel 3., dapat dilihat bahwa *p-value* t-statistik variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) adalah 0.0141 sehingga dapat dikatakan signifikan pada taraf signifikansi 5%.

Taraf signifikansi untuk pengambilan keputusan atas hipotesis ini memang lebih besar dibandingkan dengan pada hipotesis lainnya, namun pada umumnya taraf signifikansi pada hasil uji hipotesis penelitian sosial adalah 5%. Hal tersebut dikarenakan pengambilan simpulan pada penelitian sosial bersifat lebih hati-hati dibandingkan pada penelitian ilmu pengetahuan alam. Taraf signifikansi sebesar 5% tersebut dapat diartikan bahwa keterjadian variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) berpengaruh terhadap aksesabilitas pendidikan memiliki tingkat keyakinan sebesar 95%. Hal tersebut bukan berarti bahwa penggunaan variabel pengeluaran pendidikan pada model aksesabilitas pendidikan ini tidak lebih baik daripada variabel-variabel lainnya yang memiliki taraf signifikansi 1%.

Koefisien variabel BPEND bernilai positif sebesar 1,46787. Berdasarkan *p-value* dan arah koefisien variabel BPEND, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sehingga hipotesis H3 yaitu pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan diterima. Pengaruh signifikan positif antara pengeluaran pendidikan dengan aksesabilitas pendidikan menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota cukup efektif dalam meningkatkan aksesabilitas pendidikan. Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan penelitian Sukaesih (2008) dan Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui (2004).

Efektifitas peningkatan aksesabilitas pendidikan oleh pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang semakin membaik di era kebijakan desentralisasi fiskal dijelaskan oleh Innocent (2011) dalam argumennya yang mengatakan bahwasalah satu manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah bahwa hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan memudahkan pengawasan atas kinerja Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal, menurut Mardiasmo (2004) meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Hal tersebut menyiratkan bahwa dengan kebijakan desentralisasi fiskal, masyarakat dapat turut langsung mengawasi kinerja Pemerintah Daerah sehingga program kerja Pemerintah Daerah dapat berhasil dan tepat sasaran.

2. *H4a: Kesejahteraan daerah berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.*

Hasil uji hipotesis H4a dapat dilihat dari *p-value* t-statistik variabel kesejahteraan daerah (WEALTH) pada tabel 4 yang menunjukkan angka 0.000 dan koefisien variabel WEALTH yang menunjukkan nilai positif sebesar 6,05354. Berdasarkan hal tersebut,

maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik pada taraf signifikansi 1%, kesejahteraan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap aksesabilitas pendidikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Sukaesih (2008) dan Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, (2004).

Menurut Sukaesih (2008), dengan semakin tingginya kesejahteraan daerah maka kemampuan masyarakat di daerah tersebut untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah akan semakin tinggi. Baldacci, Clements, Gupta, dan Cui, (2004) menjelaskan hal tersebut dengan teori permintaan. Tingginya pendapatan per kapita (yang diukur dengan PDB per kapita) akan meningkatkan permintaan atas pendidikan.

3. *H4b: Pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.*

Untuk menguji hipotesis H4b, dilakukan regresi linier sederhana pada variabel pengeluaran pendidikan (BPEND) terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU) secara terpisah pada daerah yang kaya (dengan WEALTH=1) dan daerah yang miskin (dengan WEALTH=0) dan membandingkan koefisiennya. Hasil pengujian tersebut dirangkum pada tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan *Output* Regresi Sederhana Variabel EDU dan BPEND

Dependent Variable : Aksesabilitas Pendidikan (EDU)

	BPEND (WEALTH=1)	BPEND (WEALTH=0)
Koefisien	8,48825	1,22846
t-statistik	14.20585	34.65924
Prob(t-statistik)	0.000000	0.000000
R-squared	0.847962	0.884646
Adj. R-squared	0.828490	0.870299
F-statistik	43.54601	61.66003
Prob(F-statistik)	0.000000	0.000000

Variabel BPEND ditransformasi menggunakan *square-root*

Dapat dilihat pada tabel 4 di atas bahwa koefisien BPEND pada daerah kaya (WEALTH=1) adalah sebesar 8,48825. Angka tersebut cukup jauh di atas koefisien BPEND pada daerah miskin (WEALTH=0) yang sebesar 1,22846. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin.

4. *H5: Kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap aksesabilitas pendidikan.*

Pada tabel 3, variabel kebijakan desentralisasi fiskal (FD) menghasilkan *p-value* t-statistik sebesar 0.000 dan koefisien bernilai positif sebesar 4,46835.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik, kebijakan desentralisasi fiskal (FD) berpengaruh signifikan positif terhadap aksesabilitas pendidikan (EDU) pada taraf signifikansi 1%.

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian Sukaesih (2008), Samosir (2008), dan Simatupang (2009). Menurut Simatupang (2009), peningkatan keluaran pendidikan (diukur dengan angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat *drop out*) yang signifikan di era kebijakan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah yang terdesentralisasi secara signifikan memperbaiki layanan di bidang pendidikan. Masih menurut Simatupang, desentralisasi fiskal di Indonesia cukup membuat Pemerintah Daerah mampu memberikan layanan yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Pendapat Simatupang tersebut di atas, didukung oleh pendapat Litvack et al (1998) dalam Utama (2009) yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan pelayanan publik karena pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum.

4.3. Pembahasan Mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Aksesabilitas Pendidikan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis model pengeluaran pendidikan dengan metode regresi data panel pada subbab 4.1, dapat dilihat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan. Baik pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, maupun dana alokasi khusus bidang pendidikan terbukti mampu mendorong pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada latar belakang penelitian ini sedikit disinggung mengenai ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat sehingga besaran pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan transfer misalnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kecilnya pendapatan asli daerah tersebut mengakibatkan sebagian besar pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebenarnya masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui transfer ke daerah. Padahal, dengan desentralisasi fiskal harusnya Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk menggali potensi daerah dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara mandiri.

Tersirat dari hasil analisis model pengeluaran pendidikan dengan metode regresi data panel pada subbab 4.2 bahwa secara agregat kenaikan pengeluaran pendidikan yang diakibatkan oleh kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi

kenaikan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat, namun pada hasil pengujian H4b terlihat bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin. Pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan yang lebih besar pada daerah kaya dibandingkan dengan pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap aksesabilitas pendidikan pada daerah miskin menunjukkan bahwa seolah-olah pengeluaran pendidikan pada daerah miskin tidak seefektif pada daerah kaya dalam meningkatkan aksesabilitas pendidikan. Dimisalkan sejumlah satu milyar rupiah sama-sama dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang kaya dan yang miskin, dengan jumlah tersebut Pemerintah Daerah yang kaya akan mampu meningkatkan aksesabilitas pendidikan sebesar 7%, sedangkan Pemerintah Daerah yang miskin hanya mampu meningkatkan aksesabilitas pendidikan sebesar 5%.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijelaskan oleh penelitian sebelumnya dengan mengatakan bahwa permintaan akan pendidikan oleh masyarakat di daerah miskin akan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di daerah kaya, namun alasan dibalik rendahnya permintaan masyarakat di daerah miskin tersebut belum banyak dibahas.

Rendahnya permintaan akan pendidikan oleh masyarakat di daerah miskin dapat terjadi karena dua hal berikut ini:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok akan pentingnya pendidikan. Kebanyakan masyarakat-masyarakat di daerah tersebut mencegah anaknya untuk bersekolah dan ikut membantu pekerjaan orang tuanya untuk meringankan beban hidup.
2. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kurang memadai di daerah miskin menghambat masyarakat untuk mengakses sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dibahas pada bagian hasil dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan terbukti secara empiris dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terbukti secara empiris dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat. Kesejahteraan daerah kabupaten/kota terbukti secara empiris dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat di daerah kaya, peningkatan pengeluaran

pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota terbukti secara empiris berpengaruh lebih besar terhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin. Kebijakan desentralisasi fiskal terbukti secara empiris dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi Penelitian

Terdapat tiga pihak yang memperoleh manfaat dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah, dimana penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal sehingga desentralisasi fiskal tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik terutama kebutuhan pendidikan. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai sumber informasi dan bukti empiris mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dan hubungannya terhadap aksesabilitas pendidikan di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami pelaksanaan tersebut dan memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah. Adapun bagi dunia akademis, studi atau penelitian mengenai desentralisasi fiskal ini dapat memperkaya penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

6.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini telah dapat memberikan bukti empiris terkait hubungan antara kebijakan desentralisasi fiskal dan aksesabilitas pendidikan. Namun, dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yaitu penelitian ini hanya meneliti pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengaruhnya terhadap aksesabilitas pendidikan dan tidak memperhitungkan pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pihak swasta maupun rumah tangga. Hasil pengujian model aksesabilitas pendidikan pada penelitian ini memiliki nilai *adjusted R²* sebesar 0.443167 yang artinya sisa variasi variabel terikat sebesar 55,68% dijelaskan oleh variabel bebas lain di luar model tersebut, hal tersebut kemungkinan terjadi karena penulis hanya melibatkan variabel-variabel bebas sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk mengganti variabel terikat yang mewakili *outcome* pendidikan yaitu aksesabilitas pendidikan dengan kualitas pendidikan karena mulai tahun 2010 pengukuran indeks pembangunan manusia oleh UNDP pada dimensi pendidikan tidak lagi mengukur aksesabilitas pendidikan melainkan kualitas pendidikan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan variabel lain untuk ditambahkan kepada model yang mengukur *outcome* pendidikan, tentunya variabel tersebut harus terbukti secara teoritis berhubungan dengan *outcome* pendidikan. Variabel yang mungkin berhubungan dengan *outcome* pendidikan menurut penulis adalah variabel yang

mampu mewakili tingkat pengawasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah untuk menjamin efektivitas program Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, misalnya dengan hasil opini BPK pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

6.3. Saran Untuk Pemerintah Daerah dan Masyarakat

6.3.1 Saran Untuk Pemerintah Daerah

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, maka sangat penting untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber daya daerah dengan semaksimal mungkin sehingga ketergantungan fiskal akan semakin mengecil dan agar Pemerintah Daerah dapat berusaha untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.

6.3.2 Saran Untuk Masyarakat

Kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan terutama untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, dalam proses penyelenggaraan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, peran serta dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjamin keberhasilannya. Saran dari penelitian ini untuk masyarakat adalah agar masyarakat lebih aktif berperan serta dalam usaha pembangunan di daerah dan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Sari, et al. *Cara Cerdas Menguasai EVIEWS*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
- Baldacci, Clements, et al. *Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs*. IMF Working Paper (2004).
- Bussemeyer, Marius R. "The Impact of Fiscal Decentralisation on Education and Other Types of Spending." *MPIfG Discussion Paper 07/8* (2007).
- Gujarati, Damodar. *Basic Econometrics, 4th Edition*. Singapore: McGraw Hill, 2003.
- Hirawan, Susiyati Bambang. "Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia". *Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. 2007. 12 Mei 2012. <<http://web.me.com/adrianpanggabean/>

- Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20(Pidato%20Pengukuhan).pdf>.
- Innocents, Edouard Emmanuel. Fiscal Decentralisation: A Local Solution to Recovery From Global Recession. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 24 (2011): 138-146.
- Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kyriacou, Andreas P. and Oriol Roca-Sagalés. Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *Economic Letters* 111(2011): 191-193.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Menyoal *Desentralisasi Anggaran Pendidikan*. Media Indonesia, 2011. 17 April 2012. <<http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9075>>.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Hardius Usman. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Priyono, Edy. *Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek*. 2005. 22 Mei 2012. <<http://www.akademika.or.id/arsip/Pembiayaan%20Pendidikan-Edy%20Priyono.pdf>>.
- Qing, Luo Wei and Chen Shi. Fiscal Decentralization And Public Education Provision In China. *Canadian Social Science* Vol. 6 No. 4 (2010): 28-41.
- Samosir, Melva. *The Effects of Decentralization on Education in Indonesia: Education for All?*. Netherlands: Universiteit Maastricht, 2008.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business: A skill Building Approach, 4th Edition*. New York: John Wiley and Sons, 2003.
- Simatupang, Rentanida Renata. *Evaluation of Decentralization Outcomes in Indonesia: Analysis of Health and Education Sectors*. Georgia: Georgia State University, 2009.
- Statistik *Keuangan Pemerintah Daerah APBD 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011.
- Sukaesih, Mamay. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akses Pendidikan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Periode 1995-1997 dan 2003-2006*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Susanto, Satya dan Hendra Kurniawan. Mengukur Kinerja Anggaran Fungsi Pendidikan dan Alokasinya dalam APBN 2010. *Media Keuangan* Vol. IV (2009): 44-50.
- UNESCO. *International Workshop on Education and Poverty Eradication Kampala*, Uganda. 30 July-3 August 2001. 12 Mei 2012. <<http://www.unesco.org/education/poverty/news.shtml>>.
- United Nations Development Programme. "Sustainability and Equity: A Better Future for All". *Human Development Report 2011*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Utama, Sampurna Budi. *Menengok Kembali Isu Efisiensi Dalam Praktik Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 21 Mei 2012. http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/439_NEW%20Menengok%20isu%20efisiensi%20Pak%20Sampurna.pdf.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Yuniarti, Desi. *Pemodelan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2008 Dengan Regresi Panel*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2010.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.